



**EVALUASI HASIL PROGRAM SOLUSI KEMISKINAN
(*PROVERTY SOLUTION PROGRAM/PSP*) BIDANG
PERTANIAN DI DESA BADERAN KECAMATAN
SUMBERMALANG KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2015**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

**Diana Andalusi
NIM 130910201064**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita besarku. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang kukasihi dan kusayangi:

1. Kedua orang tuaku, Ibunda Marhama dan Ayahanda Suhatip, pendukung utama dalam keluarga, sebagai motivator terbesar dalam hidupku yang tiada henti memberiku semangat, doa, dukungan finansial, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan;
2. Saudaraku Miftahul Arifin, Laila Qutri Nada, yang senantiasa memotivasi dan mewarnai hari-hariku;
3. Keluarga besarku di Situbondo, terimakasih atas doa, semangat, dan dukungannya;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dengan penuh kesabaran;
5. Almamater yang kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

(terjemahan surat Al-Isra' ayat 7).¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Terjemahan Aljumanatul Ali Qur'an. Bandung : CV PENERBIT J-ART

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Andalusi

NIM : 130910201064

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian Di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pertanyaan iri saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Diana Andalusi

NIM 130910201064

SKRIPSI

**EVALUASI HASIL PROGRAM SOLUSI KEMISKINAN
(*PROVERTY SOLUTION PROGRAM/PSP*) BIDANG
PERTANIAN DI DESA BADERAN KECAMATAN
SUMBERMALANG KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2015**

Oleh :

Diana Andalusi
NIM 130910201064

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agus Suharsono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Inti Wasiati, MM

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015” karya Diana Andalusi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 06 November 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji
Ketua

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.A.P
NIP. 197410072000121001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031023

Dra.Inti Wasiati, M.M
NIP. 195307311980022001

Anggota I

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP. 196102131988021001

Mengesahkan
Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/Psp*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015; Diana Andalusi; 130910201064; 120 halaman; program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/Psp*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015 merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Kabupaten Situbondo. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang akan membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan hasil yang di realisasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Ex-Post Evaluation, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir.

Ada beberapa alasan mengapa permasalahan ini menarik untuk diteliti. *Pertama* Program Solusi Kemiskinan merupakan program prioritas Kabupaten Situbondo terhitung sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, kendati Program Solusi Kemiskinan sudah berakhir tahun 2015. Akan tetapi pada kenyataannya pengembangan usaha Pokmas Miskin khususnya di Desa Baderan masih tetap aktif sampai saat ini. *Kedua* Program Solusi Kemiskinan merupakan program penanganan kemiskinan Kabupaten Situbondo yang memanfaatkan karakteristik daerah mayoritas penduduk sebagai bentuk penerapan bantuan program, mayoritas penduduk rata-rata kabupaten Situbondo yang pekerjaannya sebagai Buruh Tani, Nelayan dan Peternak diberikan bantuan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi pendampingan berbasis *cluster*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam buku pedoman. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode telaah pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan terdiri dari empat proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo masih aktif sampai saat ini, budidaya tanaman bukan lagi sebatas padi akan tetapi mereka (Pokmas Baderan) sudah mengganti tanamannya berupa tembakau. Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan pada tahun 2015 belum mampu meningkatkan pendapatan anggota Pokmas, dapat dilihat dari hasil panen yang merugi dan biaya upah masih sebanding dengan upah buruh tani.

Dari hasil penelitian didapat bahwa Program Solusi Kemiskinan belum efektif, dari hasil yang dicapai belum mampu menunjukkan perubahan status ekonomi buruh tani menjadi sejahtera. Terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan yang mengakibatkan hasil yang didapat selama pelaksanaan program pada tahun 2015 belum mampu mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu program belum mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan program belum mampu memperluas kapasitas produksi kelompok melalui usaha produktif yaitu padi, karena terjadi gagal panen dan tidak dapat bekerja sama dengan pihak Mitra Usaha. Program Solusi Kemiskinan belum mampu mendorong terciptanya kesempatan kerja di desa Baderan, status anggota pokmas tetap sebagai buruh tani yang dipekerjakan dilahan milik anggota dan mendapatkan upah layaknya buruh tani, hasil panen yang didapat yaitu setengah dari hasil penjualan dibagikan untuk 12 anggota.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- a. Drs. Agus Suharsono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing utama, Dra. Inti Wasiati, MM., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian, dalam penulisan skripsi ini;
- b. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
- c. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Suhatip dan Ibunda Marhama atas doa, cinta kasih, dukungan dan motivasi yang telah diberikan tanpa henti dan tak pernah putus kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini;
- d. Kakak tersayang Miftahul Arifin dan Adik tersayang Laila Qutri Nada yang selalu memberikan semangat, dukungan dan canda kebahagiaan selama penyusunan skripsi ini;
- e. Kakak iparku Alfiah Sarah Bilqis, Sepupu Anis Safitri, Omku Anwar Ruddin dan Tanteku Fadila saudara yang memberikan dukungan, saudara berbagi suka dan duka, yang selalu mewarnai hari-hariku.
- f. Tante Narti dan Kresna Dinar Septiawan yang selalu ada saat suka maupun duka, yang selalu memberikan dukungan, memotivasi, dan selalu membantu sampai saat ini.
- g. Sahabatku Heti Yusiana, Dwi Putri Azizah Amin, Yunita Dian Amaliah, Isn Fauziah, Ika Lutfiana, Alisa Irfianty, Zumrotul Mukminin dan Muhammad

Muajib Ardiyanshah teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini;

- h. Teman-teman satu angkatan Administrasi Negara 2013 yang banyak memberikan kenangan indah selama menjalani pendidikan di Universitas Jember;
- i. Semua dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
- j. Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, BAPPEDA Kabupaten Situbondo, yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data, sehingga mempermudah penyelesaian skripsi ini;
- k. Pendamping Kecamatan Sumbermalang Bapak Iman Yushendra dan Bapak Saiful yang bersedia membantu dan mengarahkan dalam proses penelitian;
- l. Pokmas Rengganis beserta Pengurus desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, yang telah banyak membantu peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini;
- m. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Jember, 13 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMANPERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.2 Kebijakan Publik	15
2.3 Program	18
2.4 Konsep Program Solusi Kemiskinan (<i>Proverty Solution Program/PSP</i>) Kabupaten Situbondo	19
2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.6 Evaluasi Kebijakan.....	31
2.7 Kerangka Berfikir.....	38

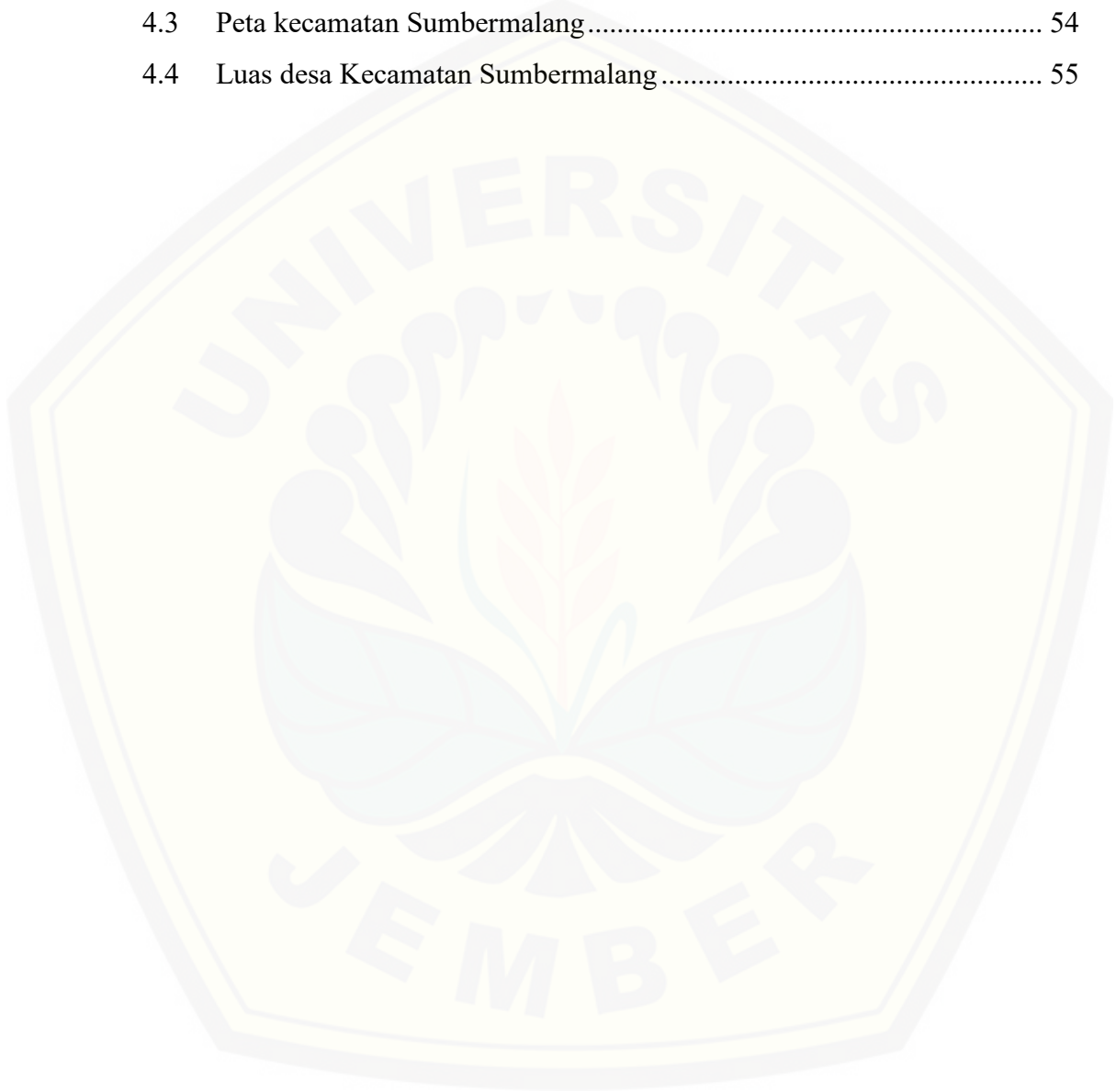
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Metode Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Situasi Sosial	41
3.5 Desain Penelitian Rancangan Penelitian Kualitatif.....	42
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	47
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	49
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	50
4.2 Gambaran Umum Program Solusi Kemiskinan	60
4.3 Evaluasi Program Solusi Kemiskinan di Desa Baderan Kecamatan Sumbemalang Kabupaten Situbondo	77
4.3.1 Evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan yang diperoleh dari Program Solusi Kemiskinan di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo	80
4.3.2 Evaluasi dengan Berbagai Kegiatan pada Program Solusi Kemiskinan di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo	91
4.3.3 Evaluasi dengan Menggunakan 6 Kriteria William Dunn	103
BAB 5. PENUTUP.....	115
5.1 Kesimpulan Saran	115
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel perbandingan angka kemiskinan tahun 2014.....	4
1.2	Perkembangan angka kemiskinan tahun 2014	4
1.3	Laporan kegiatan PSP tahun 2015.....	8
1.4	Jumlah keluarga dan klasifikasi kabupaten Situbondo 2014.....	9
1.5	Kondisi PSP bidang Pertanian masa panen tahun 2015	10
2.5	Konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan.....	25
3.1	Tabel teknik pemeriksaan keabsahan data.....	45
4.1	Pendidikan rata-rata desa Baderan tahun 2016	57
4.2	Sarana dan prasarana kesehatan Kec. Sumbermalang 2016.....	57
4.3	Mata pencaharian desa Baderan tahun 2016	58
4.4	Bantuan Sarana Produksi.....	64
4.5	Bantuan biaya produksi	64
4.6	Identifikasi sebelum PSP anggota Pokmas	65
4.7	Laporan kegiatan PSP tahun 2015.....	67
4.8	Kondisi PSP masa panen desa Baderan	70
4.9	Penguatan kelembagaan Pokmas Rengganis.....	72
4.10	Laporan upah pokmas tahun 2015.....	81
4.11	Kondisi PSP masa panen desa Baderan tahun 2015.....	86
4.12	Laporan kegiatan pendampingan PSP.....	93
4.13	Laporan kegiatan PSP tahun 2015.....	99
4.14	Kondisi PSP masa panen tahun 2015	101
4.15	Laporan kegiatan PSP tahun 2015.....	105
4.16	Kondisi PSP pada masa panen tahun 2015	109
4.17	Evaluasi dengan membandingkan hasil dengan tujuan.....	113
4.18	Tabel 6 kriteria evaluasi menurut William Dunn	119

DAFTAR GAMBAR

2.1	Ideal kebijakan publik	15
4.1	Peta kabupaten Situbondo	51
4.2	Peta kabupaten Situbondo perkecamatan	52
4.3	Peta kecamatan Sumbermalang	54
4.4	Luas desa Kecamatan Sumbermalang	55



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman. Evaluasi sangat penting dan diperlukan dalam setiap program atau kegiatan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang akan membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan hasil yang di realisasikan. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai maka program tersebut telah melakukan penyimpangan.

Program Solusi Kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, sehingga diperlukan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor dan terfokus pada aspek pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan berbasis cluster melalui Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/PSP*) di Kabupaten Situbondo.

Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten Situbondo merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya pada pelaksanaan program saja, tetapi masyarakat sebagai penerima bantuan dalam wadah kelompok diberikan keleluasaan dalam penentuan kegiatan mulai tahap perencanaan program sampai dengan pelestarian.

Menurut Iskandar (2012:2) kemiskinan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara maju. Secara umum kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan standar kebutuhan

yang lain (Herbert 2001 dalam Iskandar 2012, 2:3).

Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1960an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Selanjutnya sejak krisis ekonomi pada 1997, pemerintah mengeluarkan progam Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Pengaman Sosial.

Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya hingga saat ini dianggap belum mencapai harapan dan penanggulangan kemiskinan tersebut dalam implementasinya kadang-kadang tumpang tindih satu sama lain serta kurang fokus dalam menetapkan sasaran program, sehingga pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan tujuan tersebut, pada tahun 2010 presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tersebut diamanatkan untuk membentuk tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Starategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan. Sumodiningrat (2009:6) menjelaskan konsep pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Berdasarkan definisi tersebut, sasaran pembangunan yang utama adalah manusia. Perubahan stuktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran, maka startaegi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat adalah pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumondiningrat (2009:7) adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk

meningkatkan kesejahteraan.

Kabupaten Situbondo merupakan daerah agraris. Hal ini disebabkan sebagian wilayah ini dimanfaatkan untuk pertanian. Potensi sumberdaya alam dan kemajemukan merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan disahkannya UUD Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan dan pembangunan daerahnya sendiri.

Sebagaimana hal tersebut berlaku, dalam lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Situbondo telah berupaya melakukan langkah-langkah pembangunan yang mengarah pada kemajuan daerah. Namun, ditengah kemajuan yang sudah dicapai, masih terdapat beberapa sektor pembangunan yang belum digarap secara optimal. Kemiskinan di Kabupaten Situbondo kendati pembangunan pemerintah berorientasi pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi kenyataannya pemerataan hasil-hasil pembangunan dan akses perekonomian masih jauh dari harapan, khususnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan pedesaan.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa timur dengan tingkat kemiskinan menurut data (PPLS-08) sebesar 97.930 Rumah Tangga Miskin. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat Situbondo dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat. Masyarakat Kabupaten Situbondo memiliki kecenderungan mengutamakan nilai-nilai tradisional, tidak terkecuali masalah ekonomi. Masyarakat Situbondo hanya miskin secara kultural, yakni kemiskinan yang muncul akibat faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong untuk hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas, atau tidak adanya keinginan untuk maju. (<https://www.jatimprov.go.id./miskin-kultural-polemik-budaya-di-situbondo> diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS-08) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Situbondo adalah sebesar 97.930 Rumah Tangga Miskin (\pm 103 ribu jiwa). Sedangkan menurut Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang di

published Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Situbondo adalah sebesar 80.082 RTM. Sehingga penurunannya adalah 17.848 RTM. Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun bergerak fluktuatif.

Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Situbondo juga kurang sejalan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Penduduk dan Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun 2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2011	653.792 Jiwa	98.134 Jiwa	15,01 %
2012	776.002 Jiwa	108.873 Jiwa	14,03 %
2013	781.105 Jiwa	106.152 Jiwa	13,79 %
2014	792.031 Jiwa	99.004 Jiwa	12,50 %

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dikutip tahun 2017

Tabel 1.2 Perkembangan Angka Kemiskinan tahun 2014

Angka Kemiskinan (%)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Situbondo	15,60	18,02	15,99	16,23	15,01	14,03	13,79	12,50
Propinsi Jawa Timur	19,98	18,51	16,68	15,26	14,23	13,08	12,73	12,21
Nasional	16,58	15,42	14,15	13,33	12,36	11,96	11,47	11,25

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dikutip tahun 2017

Pada dasarnya Kabupaten Situbondo memiliki potensi yang luar biasa pada sektor pertanian dan sektor kelautan. Hal ini terlihat dari mayoritas penduduk Situbondo yang rata-rata bermata pencaharian sebagai Petani (105.174 Orang), Buruh Tani (99.357 Orang), Peternak (40.497 Orang), Pedagang (33.245 Orang),

Nelayan (17.292 Orang), Pengangkutan (7.878 Orang), pekerjaan lain-lain sekitar (12.595 orang), sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (7.962 orang) dan ABRI (646 orang) ditambah pensiunan (2.975 orang). (Sumber BPS tahun 2013, dikutip tahun 2017)

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Situbondo telah memberikan perhatian yang cukup pada masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah. Salah satunya adalah Program pananggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program*). Program tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program*) di Kabupaten Situbondo. Program ini merupakan salah satu program penanganan kemiskinan di Kabupaten Situbondo yang pada dasarnya bukan merupakan konsep baru, namun merupakan upaya optimalisasi hasil-hasil program pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur seperti *Anti Poverty Program (APP)* / Program Anti Kemiskinan.

Konsep dasar Program Solusi Kemiskinan (*Poverty Solution Program/PSP*) adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan berbasis *cluster*. Pemberdayaan masyarakat sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Program Solusi Kemiskinan kabupaten Situbondo menitikberatkan pada Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin) berupa bantuan sarana prasarana produksi yang bersifat hibah ke Pokmas Miskin yang kemudian dikelola atau diusahakan bersama oleh Pokmas Miskin dan harus dikembangkan, dengan harapan pengembangan bantuan di Pokmas Miskin untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin, memperluas lapangan usaha, dan kapasitas produksi yang berpotensi, mendorong terciptanya kesempatan kerja dan wirausaha baru di lokasi PSP, meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan

keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggungjawab.

Sesuai dengan tujuan diatas, *Proverty Solution Program* ditujukan untuk masyarakat miskin Kabupaten Situbondo yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Anggota Pokmas miskin yang ditetapkan merupakan Petani/ Buruh Tani, peternak, nelayan, pembudidaya yang pekerjaan utamanya adalah berusaha (bermata pencaharian) di bidang yang selaras dengan pengembangan komoditas. Untuk rumah tangga sasaran diverifikasi oleh dinas teknik Kabupaten sebagai sasaran Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*).

Pada pelaksanaannya *Proverty Solution Program* ini menitik beratkan pada usaha ekonomi produktif berupa bantuan kepada Pokmas Miskin yang terbagi pada tiga bidang yang meliputi :

1. Bidang Pertanian, terdiri dari : Sewa Lahan; Biaya Garap (pengolahan); dan Sarana dan Prasarana;
2. Bidang Peternakan, terdiri dari : Ternak; dan Obat-obatan;
3. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : Kolam Ikan; Benih Kolam; dan Pakan Ikan.

Dari ketiga bidang bantuan tersebut, peneliti hanya memfokuskan bantuan di bidang Pertanian. Secara garis besar Petani dan Buruh Tani merupakan pekerjaan yang mendominasi masyarakat Situbondo, sehingga layak dilakukan penelitian.

Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) telah dilaksanakan di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2012 sampai 2015. Kendati Program Solusi Kemiskinan sudah berakhir, akan tetapi pada kenyataannya pengembangan program yang melibatkan Pokmas Miskin masih tetap aktif sampai saat ini. Namun dari beberapa kecamatan yang menjadi lokasi *Proverty Solution Program*, hanya Kecamatan Sumbermalang yang masih aktif dalam melaksanakan pengembangann Program Solusi Kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Iman Yushendra, SP. Sebagai pendamping Program Solusi Kemiskinan tingkat Kecamatan di Dinas Pertanian dalam wawancara pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo menurut beliau sebagai berikut :

Sebenarnya PSP di awal mulanya di tahun 2012 tidak berjalan sesuai dengan tujuan program, kecamatan yang ditunjuk menerima bantuan program tersebut tidak berjalan sampai program berakhir dilaksanakan, artinya kebanyakan dari kecamatan tersebut tidak memperoleh hasil yang signifikan, Pokmas mutung karena faktor ego masing-masing Pokmas terhadap kendala selama pelaksanaan terkait biaya sarana dan produksi yang mengalami keterlambatan dan prosesnya yang lama.

Terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara di kecamatan Asembagus, dimana kecamatan Asembagus mendapatkan bantuan terkait Program Solusi Kemiskinan di tahun 2013. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Subaidi selaku Sekretaris Kecamatan Asembagus, beliau mengatakan bahwa tidak ada bantuan berupa program PSP di kecamatan Asembagus dan ketika peneliti menjelaskan tentang program tersebut beliau baru menanggapinya bahwa menurut beliau program tersebut kurang efektif, program PSP di Kecamatan Asembagus di tahun 2013 tidak memberi hasil positif terhadap penduduk miskin, kebanyakan setelah mendapatkan bantuan Pokmas mutung, tidak ada keberlanjutan dari program tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian PSP ditahun 2015 karena menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Saiful selaku ketua bidang teknik koordinasi PSP Kabupaten Situbondo di Kantor Dinas Pertanian dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 April 2017 beliau mengatakan untuk Program Solusi Kemiskinan di tahun 2015 ada salah satu desa di kecamatan Sumbermalang yang sampai saat ini Pokmas tersebut masih kompak dan anggota Pokmas masih aktif menjalankan usaha pertanian dari Program PSP di lahan milik Pokmas, walaupun tidak ada biaya lanjutan (pengembangan program) dari pemerintah Kabupaten Situbondo terkait Program PSP untuk Pokmas di Desa Baderan, mereka memelihara komoditas pertaniannya secara mandiri.

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat melihat bahwa untuk pelaksanaan PSP ditahun 2015 Pokmas dikecamatan Sumbermalang Desa Baderan dapat mensinkronkan egonya terhadap kendala-kendala selama pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan. Adapun Kendala-kendala selama pelaksanaan khususnya di

bidang pertanian, Hal ini disampaikan oleh Bapak Saiful selaku ketua bidang teknik koordinasi PSP Kabupaten Situbondo di Kantor Dinas Pertanian dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 , kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap pelaksanaan realisasi pencairan bantuan kurang optimal, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (mengalami keterlambatan), dan bantuann yang diusulkan oleh pokmas tidak sesuai dengan realisasi biaya dari dinas .Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Laporan Kegiatan Proverty Solution Program bulan 15 April dan 1 Juni 2015

No	Lokasi Lahan	Tahapan Kegiatan Budidaya	Biaya /Saprodi Yang Diusulkan Ke Dinas	Realisasi /Biaya Saprodi
1	Ds. Baderan	-Pengolahan Lahan -Perbaiki Pematang -Pembuatan Uritan -Cabut Bibit -Pembersihan Sisa Oleh Tanah -Penyiangan -Pemupukan -Pengendalian OPT -Panen	-Benih -Pupuk -Obat-Obatan -Upah -Sewa Lahan	-Upah -Sewa Lahan

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa bantuan berupa sarana produksi yang diusulkan ke dinas tidak cair, tidak hanya itu, kendala mengenai akses jalan yang tidak mendukung untuk transportasi membuat susah Pokmas dan pengurus hal ini dipertegas oleh pendapat bapak Iman Yushendra, selaku pedamping PSP tingkat kecamatan Sumbermalang, beliau mengatakan pada tanggal 1 Juni 2017 bahwa ketika Saprodi datang pengurus membayar lebih (upah) anggota Pokmas karena anggota Pokmas harus memikul untuk membawa Saprodi ke lahan hal ini disebabkan akses jalan yang berbatu dan terjal tidak memungkinkan untuk transportasi.

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan

perekonomian nasional. Besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Seperti halnya di kecamatan Sumbermalang.

Sumbermalang termasuk salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi No1 di Kabupaten Situbondo pada tahun 2014 dengan presentase 6.578 penduduk Prasejahtera dengan 10.39 jumlah penduduknya, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun 2014

Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah
		I	II	III	III+	
1 Sumbermalang	6 578	2 083	1 025	535	174	10 395
2 Jatibanteng	4 847	1 475	743	1 407	536	9 008
3 Banyuglugur	4 847	1 471	879	571	329	8 097
4 Besuki	2 616	4 941	7 411	4 101	3 395	22 464
5 Suboh	4 003	1 042	855	3 360	446	9 706
6 Mlandingan	4 354	2 681	1 581	806	284	9 706
7 Bungatan	2 909	1 526	2 231	1 339	566	8 571
8 Kendit	2 781	2 732	1 880	3 027	1 179	11 599
9 Panarukan	3 324	895	7 269	5 448	1 196	18 132
10 Situbondo	2 592	3 632	2 849	3 435	1 742	14 250
11 Mangaran	2 075	3 389	2 841	2 683	799	11 787
12 Panji	4 113	4 013	4 823	6 734	2 849	22 532
13 Kapongan	3 570	3 840	3 604	1 982	1 302	14 298
14 Arjasa	4 908	3 587	3 869	1 498	367	14 229
15 Jangkar	5 587	3 075	2 699	1 828	774	13 963
16 Asembagus	4 634	2 316	3 345	4 710	599	15 604
17 Banyuputih	4 142	1 673	6 698	6 761	1 932	21 206
Situbondo	67 880	44 371	54602	50 225	18 469	235 547

Sumber: BPS (dikutip tahun 2017)

Dari data diatas, peneliti tertarik untuk mengambil Lokus penelitian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti memilih lokus penelitian ini adalah karena Kecamatan Sumbermalang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lokasi *Proverty Solution Program* di tahun

2015. Kecamatan Sumbermalang merupakan kecamatan dengan tingkat penduduk prasejahtera tertinggi yaitu 6.578 jiwa di kabupaten Situbondo.

Kecamatan Sumbermalang dibagi menjadi 9 Desa yaitu, Desa Alastengah, Desa Baderan, Desa Kalirejo, Desa Sumberargo, Desa Tamankursi, Desa Taman Sari, Desa Tlogosari, Desa Taman, dan Desa Plalangan. Namun dari 9 Desa tersebut hanya 6 Desa yang mendapat bantuan Program Solusi Kemiskinan/PSP di Kecamatan Sumbermalang diantaranya, Desa Alastengah, Desa Baderan, Desa Taman Kursi, Desa Sumberargo, Desa Kalirejo dan Desa Telogo Sari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Iman Yushendra, SP. Sebagai pendamping Program Solusi Kemiskinan tingkat kecamatan Sumbermalang di kantor Dinas Pertanian pada hari Sening tanggal 20 Februari 2017 Beliau menjelaskan bahwa Program Solusi Kemiskinan/PSP di Kecamatan Sumbermalang dari ke enam (6) Desa yang terpilih, Desa Baderan termasuk salah satu Desa yang paling aktif sampai saat ini, meskipun pernah mengalami gagal panen pada tahun 2015. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Kondisi PSP Bidang Pertanian Masa Panen Desa Baderan Tanggal 4 Juni 2015 dan Tanggal 4 November 2015

No	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Luas Lahan Terkena Penyakit	Jenis Hama	Harga Jual Hasil Panen	Hasil Kotor Penjualan
1	1 Ha	50 Kg	0,2 Ha	Busuk Leher	Rp. 7500,-	Rp. 375.000,-
		105 Kg	0,3 Ha	Penggerak Batang	Rp. 7500,-	Rp. 787.500,-
		170 Kg	0,5 Ha	Xhantomo nas	Rp. 7000,-	Rp. 1.190.000,-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dikutip tahun 2017

Data diatas menunjukkan di bulan Juni dan Novermber merupakan masa panen, dimana Pokmas Miskin mendapat hasil penjualan sebesar Rp. 2.352.500. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi gagal panen dan merugi di tahun 2015. Karena menurut wawancara tanggal 1 Juni 2017 bapak Abu Sawar Ketua

Pokmas desa Baderan mengatakan bahwa, terjadinya kegagalan selama masa panen tersebut diakibatkan oleh lahan tanah tidak cocok ditanam padi. Ketidakcocokan yang dimaksud adalah :

1. Perbedaan regional dalam topografi. Faktor iklim di dalamnya termasuk suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara dan angin sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan padi. Cuaca yang tidak mendukung, tanah lembab karena berada di dataran tinggi atau pegunungan, musim hujan dan kurangnya cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan padi. sehingga pada saat itu tanaman padinya terserang berbagai hama dan penyakit.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan tahun 2015. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian *Ex-Post Evaluation*, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fokus dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pencapaian keberhasilan Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian pada tahun 2015. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo tahun 2015.”

1.2 Rumusan Masalah

Pada umumnya pengertian dari rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena. Berangkat dari definisi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi

Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Bidang Pertanian Pada Tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo tahun 2015 dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan di buku pedoman.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat hendaknya memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar terkait objek dan bahasan penelitiannya. Kata lainnya, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik itu untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan definisi diatas tersebut, beserta rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi Dunia Akademis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu Adiministrasi Negara, khususnya terkait dengan Kebijakan Publik yaitu Evaluasi Program Solusi Kemiskinan ;
- b. Bagi Pemerintah, manfaat praktis yang diharapkan bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah penulisan laporan penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan positif terkait program pengentasan kemiskinan yang nantinya dijadikan bahan masukan positif ;

- c. Bagi Masyarakat Luas, Manfaat yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas terkait Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di desa Baderan kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Buku pedoman penulisan karya ilmiah universitas jember (2016:49) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori.

Berdasarkan definisi mengenai tinjauan pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka membantu peneliti untuk memahami realita yang ada dilapangan, dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka berpikir peneliti.

Buku pedoman penulisan karya ilmiah universitas jember (2016:50) menyebutkan bahwa kajian teori dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap berikut : (1) mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada berkaitan dengan masalah yang dibahas; (2) membandingkan dan memilih teori yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas; (2) membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan masalah; (3) membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori; dan (4) menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendapat atau teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik
2. Program
3. Program Solusi Kemiskinan (Proverty Solution Program/PSP)
4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
5. Evaluasi Kebijakan Publik

Kelima konsep dasar tersebut diharapkan dapat membentuk kerangka berpikir peneliti yang dapat mempermudah peneliti menemukan jawaban atau suatu

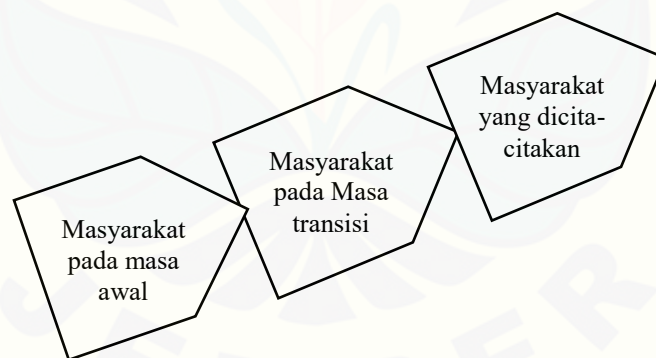
permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti. Dari konsep di atas menjadi gambaran umum peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Michael E. Porter (1998) dalam bukunya Nugroho, (2012, 183:184) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya. Setiap hal di dunia pasti ada tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Kebijakan publik menurut Nugroho, (2012, 184:185) mendeskripsikan kebijakan publik seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Ideal kebijakan publik



Sumber: Riant Nugroho Public policy tahun 2012

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 (Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dsb) dan sarana (mobil, bahan bakar, dsb) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.

Sementara itu, Laswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2012:5) menjelaskan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik.

Thoha (2002:59-60) merumuskan bahwa kebijakan mempunyai 2 aspek pokok. *Pertama*, kebijakan merupakan praktik sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. *Kedua*, kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Menurut Winarno (2007:15) dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, dibidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berhasil namun banyak juga yang gagal.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Charles Lindblom (1986) dalam bukunya Winarno (2007: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (1998: 22) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda

kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut;

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan;

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan suatu program. Dalam pelaksanaan suatu program, tidak selalu mengalami keberhasilan seperti yang telah direncanakan dan seringkali mengalami kegagalan dalam mencapai sasarannya. Dengan evaluasi akan diketahui faktor penyebab kegagalan sehingga dapat segera dicari solusi-solusi agar ke depannya tidak mengalami kesalahan yang sama dan dapat lebih baik lagi dalam pengimplementasian program. Tidak hanya faktor penyebab kegagalan saja yang akan diketahui, tetapi juga keberhasilan-keberhasilan dari pelaksanaan program dapat diketahui yang selanjutnya akan dikembangkan dan akan dijadikan contoh atau pedoman bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Beberapa tahapan penyusunan kebijakan di atas merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan kebijakan sehingga kebijakan tersebut tidak berhenti hanya pada proses penyusunan kebijakan saja, melainkan sampai pada tahapan implementasi kebijakan dan evaluasi dari kebijakan tersebut.

2.3 Program

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, terdapat dua pilihan langkah yang memungkinkan. Menurut Syafaruddin (2008:86) kedua langkah yang memungkinkan dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan yakni: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program; atau 2) melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut Arikanto dan Syafaruddin (2008:4) ada dua pengertian untuk istilah program yaitu pengertian secara khusus adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.

Dari kedua definisi tersebut dapat diartikan program adalah :

- a. Implementasi atau realisasi dari suatu kebijakan
- b. Instrument kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program

- c. Berlangsung secara berkesinambungan
- d. Program berlangsung dengan melibatkan sekelompok orang

2.4 Konsep Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten Situbondo

Program merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Dalam kata lain program menurut Suharsimi (2004:3), bahwa ada 3 unsur penting dalam program diantaranya :

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang

Ketiga unsur tersebut merupakan suatu gambaran pelaksanaan program mulai dari program tersebut merupakan realisasi dari suatu kebijakan yang bisa dikaitkan dengan pengesahan suatu program. Jangka waktu pelaksanaan program memiliki waktu yang cukup lama serta dilakukan oleh sekelompok orang. Jika dikaitkan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten Situbondo merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya pada pelaksanaan program saja, tetapi masyarakat sebagai penerima bantuan dalam wadah kelompok diberikan keleluasaan dalam penentuan kegiatan mulai tahap perencanaan program sampai dengan pelestarian. (Perbup No 21 Tahun 2012)

Konsep dasar Program Solusi Kemiskinan/PSP adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin) mendapat bantuan sarana prasarana produksi yang bersifat hibah ke Pokmas Miskin yang kemudian dikelola atau diusahakan bersama oleh Pokmas Miskin dan harus dikembangkan. Program Solusi Kemiskinan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumbermalang di tahun 2015 menitikberatkan usaha ekonomi produktifnya pada 2 (dua) bidang yaitu Pertanian serta Peternakan. (Perbup No 21 Tahun 2012)

Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin) mendapat bimbingan dari

Tim Pokja Tingkat Kecamatan, Pendamping PSP terkait dengan pendampingan teknis yaitu standard kualitas produk usaha yang dihasilkan (hasil pertanian dan peternakan). Jika Pokmas Miskin memiliki Mitra Usaha pada perkembangan usahanya maka pendampingan teknis tentang standard kualitas produk usaha yang dihasilkan akan diberikan oleh Mitra Usaha.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Solusi kemiskinan (*Proverty solution program/ PSP*) Kabupaten Situbondo menurut isi Perbup No 21 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin;
- b. Memperluas lapangan usaha dan kapasitas produksi kelompok masyarakat miskin yang berpotensi melalui usaha produktif yang berbasis *cluster*;
- c. Mendorong terciptanya kesempatan kerja dan wirausaha baru di lokasi PSP.
- d. meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab.

Alur /Tahapan Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan peneliti lampirkan dihalaman lampiran. Alur tahapan menjelaskan tahapan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengembangan.

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Program Solusi Kemiskinan, maka dibentuk suatu sistem organisasi pengelolaan dan pelaksanaan dengan fungsi dan struktur di masing-masing tingkat/wilayah (Petunjuk Teknis Program Solusi Kemiskinan) sebagai berikut :

1. Jalur struktural

Pengarah	: Bupati dan Wakil Bupati Situbondo
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Kepala Bappeda
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda
Sekretaris	: Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bappeda
Anggota	: SKPD Teknis dan Bappeda

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan melakukan Koordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten, Camat/ Pokja Kecamatan yang di bantu oleh Pendamping PSP. Pokja kecamatan merupakan pengelola PSP tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Kepala Bappeda dan diketuai oleh Camat dengan keanggotaan dari petugas Teknis Kecamatan dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

2. Jalur Fungsional

Pendamping PSP bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten Pokja Kecamatan, Kepala Desa Serta Pokmas Miskin. Berikut ini merupakan sistem organisasi pengelolaan dan pelaksanaan dengan fungsi dan struktur di masing-masing tingkat/wilayah menurut Petunjuk Teknis Program Solusi Kemiskinan :

1. Tingkat Kabupaten

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten meliputi:

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kabupaten;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Operasional PSP Tahun 2015;
- c. Melakukan seleksi Pendamping PSP;
- d. Melakukan Sosialisasi PSP kepada Kecamatan yang menjadi lokasi PSP;
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PSP;
- f. Melaporkan pelaksanaan PSP kepada Bupati.

2. Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan PSP di tingkat kecamatan, maka dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kecamatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA selaku Ketua Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten. Tugas POKJA Kecamatan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kecamatan;
- b. Membantu Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kecamatan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSP;

d. Melaporkan pelaksanaan PSP kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

3. Desa

Desa lokasi PSP memiliki tugas antara lain :

- a. Melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan / perencanaan kegiatan yang sejenisnya untuk memantapkan identifikasi kebutuhan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) / rapat pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan PSP dan rencana pengembangan bantuan PSP.

4. Pendamping PSP.

Pendamping PSP memiliki tugas antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Dinas Teknis Kabupaten, POKJA Kecamatan dan Kepala Desa;
- b. Melakukan verifikasi calon anggota Pokmas Miskin berdasarkan Data PPLS 2011;
- c. Melakukan Musdes Perencanaan, Musdes Pertanggung-jawaban dan Musdes Pengembangan Bantuan;
- d. Melakukan Pendampingan terhadap Pokmas Miskin PSP yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur : ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan motivasi;
- e. Melakukan identifikasi pendapatan anggota Pokmas Miskin sebelum dan sesudah terbantu pelaksanaan PSP Tahun 2014;
- f. Bersama Pokja Kecamatan memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi pada Pokmas Miskin;
- g. Membuat laporan pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan dan pertanggungjawaban kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan pada POKJA Kecamatan;.
- h. Melakukan Pendampingan terhadap Pokmas Miskin PSP di desa wilayahnya yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang meliputi unsur-unsur : ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan motivasi;

- i. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan PSP;
- j. Membuat Laporan Bulanan/Triwulan/Akhir Tahun kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan pada POKJA Kecamatan.

5. Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin)

Pokmas Miskin memiliki tugas antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Pokja Kecamatan, dan Pendamping PSP;
- b. Menandatangani Berita Acara Penerimaan barang setelah menerima input / sarana produksi bantuan dari Dinas Teknis (untuk Pokmas Miskin yang mendapat saprodi);
- c. Menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban asli atas penggunaan dana (untuk yang bantuan langsung) kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melalui Dinas Teknis Kabupaten dan laporan proses pelaksanaan program;
- d. Melaksanakan pertanggungjawaban, yaitu penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program PSP dalam forum publik yaitu dalam bentuk Musdes / Rapat Pertanggungjawaban.

6. Mitra Usaha

- 1) Mitra Usaha yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pokmas Miskin yang menjadi Mitranya berhak untuk melakukan pembinaan & pengembangan SDM, kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh Pokmas Miskin yang menjadi mitranya;
- 2) Membeli produk yang dihasilkan oleh Pokmas Miskin dengan harga sesuai / diatas harga pasar.

Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmas Miskin) dibentuk pada Satu Desa Selama 1 tahun, yaitu tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahap pengembangan dilaksanakan secara mandiri oleh Pokmas.

2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya hingga saat ini dianggap belum mencapai harapan dan penanggulangan kemiskinan tersebut dalam implementasinya kadang-kadang tumpang tindih satu sama lain serta kurang fokus dalam menetapkan sasaran program, sehingga pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan tujuan tersebut, pada tahun 2010 presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tersebut diamanatkan untuk membentuk tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan. Sumodiningrat (2009:6) menjelaskan konsep pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Berdasarkan definisi tersebut, sasaran pembangunan yang utama adalah manusia. Perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran, maka startaegi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat adalah pemeberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumondiningrat (2009:7) adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif.

Saat ini strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan

pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Konsolidasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Jenis	Bentuk Program	Sasaran	Filosofi	Program
Klaster I	Bantuan dan Perlindungan Sosial	Diperuntukkan bagi mereka yang termasuk dalam kelas the poorest of the poor (rumah tangga sangat miskin)	Kelompok masyarakat yang seperti ini di beri “ikan” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya	Ex: PKH, BOS, Raskin, Jamkesmas, BLT, dll
Klaster II	Pemberdayaan Masyarakat	Diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang telah mendapatkan peningkatan, naik gizi, kesehatan, maupun pendidikan	Pada program ini masyarakat tidak diberi ikan melainkan pancing, dengan harapan mereka bisa mencari ikan sendiri	Ex:PNPM, PSP(program solusi kemiskinan), dll
Klaster III	Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kelompok-kelompok masyarakat yang telah ditingkatkan dan diberdayakan kemandiriannya	Pada program ini masyarakat di beri kail, jala, dan perahu	Ex:KUR(program penyaluran kredit usaha rakyat

Sumber: Sumodiningrat (2009:7:1)

Maka dari itu beragam upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bentuk program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat salah satunya yang dilaksanakan oleh Kabupaten Situbondo pada tahun 2012-2015 yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat penduduk miskin melalui Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*).

Kartasmita (dalam Mardika dan Purwoko, 2012:163) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dari berbagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya
- b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan yang menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu, karena itu seperti telah disinggung dimuka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan.

Dalam penerapan pendekatan pemberdayaan, dapat dilakukan melalui 5P yaitu (Suharto (2005)):

- a. Pemungkinan
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan stuktur yang menghambat
- b. Penguatan
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan

harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat terhadap kelompok kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjauh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun kemampuan yang diwujudkan dalam pengetahuan dan keterampilan serta ditunjang oleh sikapnya diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut (Anwas, 2013:62).

1. Kompetensi Pemahaman Sasaran

Kompetensi dalam memahami potensi sasaran adalah kemampuan individu dalam mengidentifikasi sumberdaya yang dapat dikembangkan sesuai tuntutan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap sumberdaya (alam, sosial, dan budaya) yang dimiliki sasaran terutama yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan dan kehidupan kearah yang lebih baik

2. Kompetensi menumbuhkan kesadaran

Menumbuhkan kesadaran merupakan bagian inti dalam pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini diperlukan setelah agen pemberdayaan memahami karakteristik, potensi dan kebutuhan sasaran

3. Kompetensi komunikasi inovasi

Dimensi komunikasi inovasi adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kompetensi dan kehidupannya

4. Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan

Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan dapat diartikan sebagai kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah.

5. Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam menciptakan proses belajar kepada masyarakat dalam mengubah perilakunya yaitu meningkatkan kemampuan, kualitas hidup dan kesejahteraannya. Melalui belajar, masyarakat diharapkan mampu menguasai dan menerapkan inovasi yang lebih menguntungkan bagi diri dan keluarganya

6. Kompetensi pengelolaan pelatihan

Dalam kehidupan di masyarakat seperti petani atau nelayan, kegiatan pelatihan, kursus tani, sekolah lapang, atau istilah sejenis lainnya merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan mereka menuju peningkatan kualitas hidupnya. Dalam pemberdayaan masyarakat, keragaman masyarakat akan memberikan banyak pilihan jenis-jenis pelatihan yang akan dilakukan.

7. Kompetensi pengembangan kewirausahaan

Kemampuan mengembangkan kewirausahaan bagi agen pemberdayaan diantaranya kemampuan dalam: menanamkan sikap mental kepada masyarakat untuk berani mengambil resiko, mencari peluang, cara pandang (visi) terhadap perubahan, dan inisiatif untuk berubah

8. Kompetensi pemandu sistem jaringan

Kegiatan pemberdayaan hendaknya diarahkan pada bentuk kewirausahaan dan kemandirian. Oleh karena itu pemberdayaan perlu menciptakan kerjasama atau jaringan dengan lembaga yang menangani produk-produk pengolahan dan pemasaran hasil serta pihak-pihak penyedia modal

9. Kompetensi menumbuh kembangkan kelembagaan

Kompetensi agen pemberdayaan dalam menumbuhkan kelembagaan masyarakat meliputi : kemampuan dalam menguatkan atau kemampuan dalam membentuk kelembagaan yang belum ada tetapi diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya, mensinergikan kelembagaan yang telah ada, termasuk dengan kelembagaan yang baru terbentuk. Serta membangun kerjasama kelembagaan yang ada di masyarakat dengan kelembagaan diluar masyarakat, dengan prinsip saling memahami, menghargai, dan saling menguntungkan

10. Kompetensi pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh agen pemberdayaan. Kemampuan yang harus dimiliki dalam aspek pendampingan meliputi : kemampuan memberikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, kemampuan dalam meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat termasuk keluarga miskin memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk berbuah meningkatkan kualitas kehidupannya

11. Kompetensi melek TIK

Teknologi informasi dan komunikasi telah merambah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu agen pemberdayaan dituntut untuk mampu melek teknologi ini dalam menunjang kelancaran kegiatan pemberdayaan. Melek informasi dan komunikasi bagi agen pemberdayaan dapat berfungsi mulai dari : mencari informasi yang berkembang sesuai kebutuhan pemberdayaan, sebagai media komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lain dalam mendukung kegiatan pemberdayaan

12. Kompetensi mencari sponsorship

Untuk mensukseskan kegiatan pemberdayaan diperlukan dukungan sponsorship. Dukungan tersebut dalam pemberdayaan dapat berupa: tenaga, pemikiran/ide, fasilitas, kerjasama dan dukungan dalam bentuk financial. Dukungan sponsorship atau dukungan dana untuk kegiatan pemberdayaan dapat diperoleh melalui organisasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia usaha, yayasan, lembaga-lembaga donor, atau individu

13. Kompetensi mempengaruhi media massa

Sebagai agen pemberdayaan, media massa penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana mempengaruhi media massa untuk kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat mengundang media massa dalam event pemberdayaan, membuat press release, atau melibatkan institusi media massa kedalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

Dilihat dari 13 dimensi diatas penelitian ini termasuk dalam Kompetensi Pemandu Jaringan dan Kompetensi Pendampingan, karena dengan pemberdayaan berupa pemandu sistem jaringan diharapkan Pokmas dapat diarahkan pada bentuk kewirausahaan dan kemandirian. Demikian juga dengan kompetensi pendampingan, karena Program Solusi Kemiskinan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat khususnya Pokmas Miskin dengan didampingi oleh pendamping di setiap kecamatan.

Didalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang terpenting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi sebagai pelaku pembangunan yang aktif, bukan hanya menerima atau sebagai yang pasif. Gerakan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan ide dan kreasi masyarakat dengan strategi adalah memberi kekuatan kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus diberdayakan agar mampu untuk mengenali kebutuhan-kebutuhannya dan membuat rencana-rencana serta mampu untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.

Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat perlu ditentukan indikator untuk mengukur keberhasilan suatu program. Suatu program dianggap berhasil ketika telah mencapai indikator yang ditentukan dan sebaliknya program

dianggap gagal ketika tidak mencapai indikator yang telah ditentukan. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat lima indikator keberhasilan menurut Sumodiningrat (1999:88-89), yaitu: *Pertama*, berkurangnya jumlah penduduk miskin. *Kedua*, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. *Ketiga*, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. *Keempat*, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat. *Kelima*, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

2.6 Evaluasi Kebijakan

Pada setiap program yang telah dijalankan atau akan dijalankan tidak terlepas dengan apa yang dinamakan pengawasan. Salah satu mekanisme yang sering dijalankan dalam melakukan pengawasan program adalah dengan cara evaluasi. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah

yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Dalam bukunya Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses Winarno, (2008:201) mengutip pernyataan Edward A. Sucman yaitu di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain;
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dengan ini, evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

2.6.1 Pendekatan Evaluasi

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2005:124), yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

a. Evaluasi Semu

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.

b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan formal oleh pembuat kebijakan

c. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis (*Decision Theoritic Evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder.

Ada beberapa jenis evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli. Winarno (2008, 235) mengemukakan 3 jenis evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur suatu program atau kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan (*Ex-Ante Evaluation*)

Tahap perencanaan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dan berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi jenis ini dimaksudkan untuk mengetahui layak tidaknya suatu kebijakan atau program untuk diimplementasikan. Evaluasi ini dilakukan sebelum kebijakan atau program diimplementasikan.

2. Tahap Pelaksanaan (*On-Going Evaluation*)

Evaluasi jenis ini dilakukan pada waktu kebijakan atau program sedang berjalan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah keluaran kebijakan sampai pada kelompok sasaran dengan tepat, seperti tepat waktu pelaksanaan seperti dijadwalkan, tepat sasaran seperti yang digariskan dalam dokumen kebijakan, dan tepat jumlah atau volume output yang harus diterima kelompok sasaran.

3. Tahap Pasca-Pelaksanaan (*Ex-Post Evaluation*)

Tahap pasca pelaksanaan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Tahap ini bertujuan untuk melihat apakah pencapaian (output/outcome/impact) program mampu mengatasi masalah yang ingin dipecahkan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Fokus utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan kondisi kelompok sasaran antara sebelum dan sesudah kebijakan atau program diimplementasikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi pasca-pelaksanaan (*Ex-post Evaluation*). Karena dalam penelitian dijelaskan di dalam perbup No 21 tahun 2012 tentang pedoman umum penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan di Kabupaten Situbondo bahwa program tersebut dilaksanakan di tahun 2012 sampai tahun 2015.

Abidin (2012:166) mengemukakan bahwa evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri, maupun karena kelemahan dalam implementasi. Tujuan dari evaluasi akhir ini adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada keseluruhan proses, oleh karena itu, objek yang diidentifikasi bukan hanya pada kegagalan, melainkan juga pada keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sedangkan keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan.

Abidin (2012:171) mengemukakan bahwa evaluasi akhir dari suatu kebijakan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik penilaian surut. Artinya, evaluasi dimulai dari ujung, pada akhir suatu kebijakan menuju ke output, implementasi, dan proses perumusan kebijakan pada tahap awal. Lebih lanjut Abidin menjelaskan bahwa ada dua kelompok besar kegiatan dalam evaluasi, diantaranya :

- a. Evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan
- b. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan dalam proses kebijakan

2.6.2 Kriteria Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Secara umum Dunn (1998:61) mengemukakan 6 kriteria evaluasi yang terdiri dari.

1. Efektifitas, efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas disebut juga hasil guna. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil-hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos monoter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. efisiensi sering dipakai dalam ukuran-ukuran keuangan. Efisiensi lebih berorientasi kuantitatif sedangkan efektifitas berorientasi kualitas.
3. Kecukupan, kecukupan dalam suatu kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Perataan, perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencakupi apabila biaya manfaat merata.

5. Responsivitas, responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktifitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkaitan dengan seberapa kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan.
6. Ketepatan, ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ketepatan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

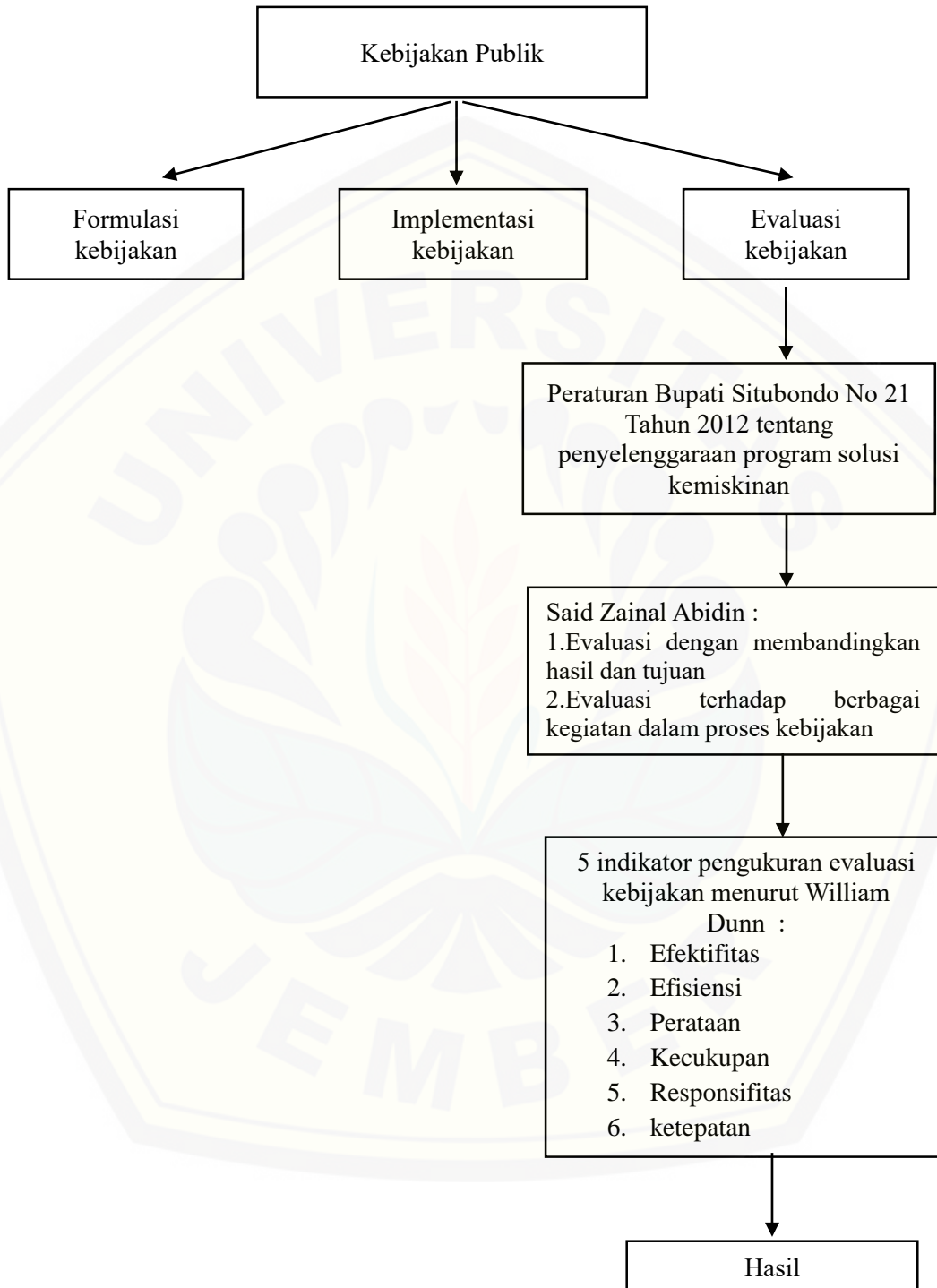
Subarsono (201:120), menjelaskan beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Berapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Seberapa besar kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif
5. Mengetahui jika ada penyimpangan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target

6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.



2.7 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) metode penelitian merupakan penggunaan aspek epistemologis yang diterangkan dalam bab tersendiri secara terperinci dan jelas. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Bab metode penelitian ini akan menguraikan beberapa sub-sub bab yang meliputi:

1. Jenis penelitian;
2. Tempat dan waktu penelitian;
3. Situasi sosial;
4. Desain penelitian rancangan penelitian kualitatif;
5. Teknik dan alat perolehan data;
6. Teknik penyajian data dan analisis data.

3.2 Jenis Penelitian

Pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mengemukakan jenis penelitian sebagai penegasan kategori penelitian yang akan dilakukan. Didalam judul dan masalah yang ada, peneliti menggunakan metode yang menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan suatu objek penelitian,

dimana model ini lebih dikenal dengan penilitan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2008:36).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian ini didasarkan pada kondisi alamiah. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif tentang Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 2015.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Menurut buku pedoman karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini karena penelitian yang dilakukan bermula dari adanya suatu permasalahan yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Oleh karena itu, penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki relevansi dengan lokasi, waktu pelaksanaan penelitian serta kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek dan bahasan penelitian.

Penelitian ini bertempat di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo sebagai tempat penelitian dengan alasan sebagai berikut :

1. Belum adanya penelitian di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang terkait dengan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten situbondo.
2. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan Program Solusi Kemiskinan dibidang pertanian dan pemberdayaan

masyarakat dan melaksanakan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*).

3. Kecamatan Sumbermalang merupakan kecamatan dengan kapasitas Rumah Tangga Miskin (RTM) tertinggi nomor 1 (satu) se Kabupaten Situbondo, yaitu sebesar 6 578 RTM dengan jumlah penduduk 10 395 orang.
 4. Desa Baderan merupakan Desa dengan tingkat penduduk rata-rata bermata pencaharian sebagai Buruh Tani.
 5. Dalam pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan (*proverty solution program/PSP*) di desa Baderan masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan anggaran dana bantuan dan gagal panen.
 6. Desa Baderan termasuk desa yang menerapkan kegiatan pertaniannya sampai saat ini walaupun sudah tidak ada lagi bantuan terkait program PSP.
 7. Tingkat pendidikan petani rendah dan permodalan yang terbatas
- Waktu penelitian ini dilakukan peneliti pada tahun 2017 dimana terhitung sejak dilakukannya observasi awal pada bulan februari.

3.4 Situasi Sosial

Situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*). Pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Baderan di kecamatan Sumbermalang kabupaten Situbondo sebagai penerima manfaat Program Solusi Kemiskinan (Proverty Solution Program/PSP) Kabupaten Situbondo.

2. Pelaku

Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan bidang Pertanian di desa Baderan kecamatan sumbermalang antara lain, sebagai berikut :

1. Ketua Pokmas Miskin : Bapak Abu Sawar
2. Sekretaris : Bapak Jamsur

3. Bendahara : Bapak Hanan

4. Anggota Terdiri Dari : Bapak Ali, Bapak Pujianto, Bapak Kotel, Bapak Buridin, Bapak Sunardi, Bapak Murakwi, Bapak Toso, Bapak Sowardi, Bapak Engrup P. Najad, Bapak Asto, Bapak Nisuun, Dan Bapak Bidin.

3. Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Tahap perekrutan pendamping PSP, koordinasi/ sosialisasi PSP dan pembekalan / Bimtek bagi pendamping;
2. Tahap verifikasi anggota Kelompok Masyarakat Miskin, Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan yang menghasilkan output tentang pematapan usulan kegiatan dan aturan main pokmas);
3. Pendampingan dan pembinaan secara rutin ke Pokmas meliputi : administrasi/ pembukuan, penguatan kelembagaan/ kelompok, penguatan keuangan Pokmas dan penguatan usaha Pokmas, pertemuan rutin anggota Pokmas, persiapan untuk pelaksanaan Pokmas dan realisasi bantuan ke Pokmas;
4. Kegiatan anggota Pokmas berupa : pengolahan lahan, perbaikan pematang, pembuatan uritan, cabut bibit, pembersihan sisa olah tanah, penyiangan dan pengendalian OPT.

3.5 Desain Penelitian Rancangan Penelitian Kualitatif

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52), desain penelitian menetapkan peneliti sebagai Human Instrument, berfungsi menetapkan Fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Menurut silalahi (2009;26) desain penelitian adalah rencana dan stuktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Selanjutnya

dalam penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo pada tahun 2015, apakah Program tersebut sesuai dengan target sasaran dan tujuan program;
2. Mendeskripsikan pencapaian keberhasilan / kegagalan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

3.5.1 Penentu Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan dengan pertimbangan bahwa informan ini merupakan aktor yang terlibat langsung dan mengetahui latar belakang terkait Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Situbondo, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kepala BAPPEDA kabupaten Situbondo sebagai penanggung jawab dan Bidang ekonomi terkait dengan *liding sector* pelaksana tingkat Kabupaten Situbondo.
- b. Pendamping PSP tingkat Kabupaten di Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian kabupaten Situbondo yang diwajibkan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan PSP di Tingkat Kabupaten..
- c. Pendamping PSP Kecamatan Sumbermalang yaitu Bapak Iman Yushendra, SP. Terkait dengan *Monitoring Evaluasi* (Monev), Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan, pendampingan terhadap Pokmas Miskin di tingkat Kecamatan Sumbermalang terkait dengan program PSP Kabupaten Situbondo
- d. Pokja Miskin di Desa Baderan yang dikoordinir oleh Ketua Pokmas Miskin : Bapak Abu Sawar, Sekretaris : Bapak Jamsur, Bendahara : Bapak Hanan, Anggota : Bapak Ali, Bapak Pujiyanto, Bapak Kotel, Bapak Buridin, Bapak Sunardi, Bapak Murakwi, Bapak Toso, Bapak Sowardi, Bapak Engrup P. Najad, Bapak Asto, Bapak Nisuun, Dan Bapak Bidin.

3.5.2 Pengumpulan Data

Pengertian sumber data menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah penjelasan mengenai sumber atau asal data penelitian yang diperoleh. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*" dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau

data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data antara lain, sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan hal yang akan dikaji yaitu Evaluasi Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo pada tahun 2015, dari hasil observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, catatan lapangan dan wawancara;

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat peneliti dari hasil studi literatur dan dokumentasi terkait dengan Evaluasi Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo pada tahun 2015.

3.5.3 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Untuk itu dirasa sangat perlu peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini sebagai salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2014:327) teknik pemeriksaan keabsahan ialah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Tabel Teknik Pemriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas(derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian Kebergantungan Kepastian	8. Uraian rinci 9. Audit kebergantungan 10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data diatas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Dengan ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan ini diharapkan peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data;

- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Didalam teknik ini, peneliti perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya. Diskusi sejawat ini dilakukan dengan Mohammad Muajib, Heti Yusiana, Isni Fauziah, Ika Lutfiana, Alisa Irfianty merupakan mahasiswa Universitas Jember.

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Di dalam penelitian kualitatif, data merupakan salah satu instrumen yang didapat dari berbagai sumber yang setelah itu akan diolah menjadi sebuah informasi yang akan mendukung hasil dari penelitian tersebut. Didalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Menurut Sugiyono, (2011:233) teknik pengumpulan data merupakan lankah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Telaah Pustaka

Menurut Silalahi (2012:96) telaah pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian untuk menghindari duplikasi, membantu merancang tahapan penelitian dan membantu peneliti untuk membentuk kerangka teoritis terkait masalah penelitian yang akan dikaji;

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) yang dikutip dari sugiyono (2014:166). Mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Faisal (1990) sebagaimana yang dikutip dalam sugiyono (2014:64) observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar.

Pada jenis penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode observasi terang-terangan dimana sedari awal peneliti akan berterus terang kepada sumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Namun, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan metode tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi menurut Sugiyono (2014:82) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan.

Dari penelitian ini, dibutuhkan berbagai dokumen yang relevan terkait dengan pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Dokumen yang dibutuhkan antara lain Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman umum penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten Situbondo. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten Situbondo. Petunjuk Pelaksana Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) Kabupaten Situbondo.; Dokumen mengenai Laporan Bulanan pendamping *Proverty Solution Program/PSP* Bidang Pertanian terkait dengan kegiatan Pokmas Miskin *Proverty Solution Program /PSP* Tahun 2015; Dokumen mengenai Laporan

Bulanan Pendamping *Proverty Solution Program* /PSP kecamatan sumbermalang mengenai Perkembangan Keuangan Pokmas Miskin bidang Pertanian; serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program*/PSP) di Kabupaten Situbondo.

4. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari sugiyono (2014:72) mengemukakan bahwasannya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg juga mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak struktur.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Berdasarkan definisi mengenai teknis analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data Menurut Silalahi (2012:340), adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.
2. Penyajian data menurut Silalahi (2012:340), merupakan penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan.
3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, merupakan proses terakhir setelah penyajian data. menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Evaluasi Hasil Program Solusi Kemiskinan Bidang Pertanian di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo pada tahun 2015, Program Solusi Kemiskinan telah dapat mencapai tujuan sebagaimana hasil evaluasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman. Terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin desa Baderan.
2. Program Solusi Kemiskinan mampu melibatkan anggota Pokmas dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab
3. Dilihat dari 6 indikator pengukuran menurut William Dunn, bahwa pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan belum efektif, terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan, akan tetapi respon target group terhadap bantuan program cukup baik, tidak merugikan buruh tani. akan tetapi Program Solusi Kemiskinan belum mampu menjawab permasalahan Kemiskinan di desa Baderan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat dijadikan masukan terkait program penanggulangan kemiskinan yaitu Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program*), maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dari segi input diperlukan kesiapan anggaran yang lebih dari pemerintah Kabupaten Situbondo, agar kebutuhan selama pelaksanaan program di lapangan dapat terpenuhi

2. Perlu adanya pengembangan program dari pemerintah Kabupaten Situbondo, pengembangan program diperlukan untuk menunjang pengembangan usaha milik anggota Pokmas
3. Pencairan dana seharusnya langsung dicairkan ke rekening kelompok, tidak melibatkan birokrasi (Dinas Pertanian), agar dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan pencairan dana, serta dana dapat disesuaikan secara langsung oleh pokmas dengan kebutuhan dilapangan
4. Dalam menentukan jenis bantuan seharusnya pemerintah mempertimbangkan terlebih dahulu karakteristik kondisi dan keadaan alam, musim, dan keadaan usaha tani, agar jenis bantuan yang pemerintah berikan kepada penerima bantuan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat meminimalisir terjadinya kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika
- Anwas, M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung. Alfabeta
- Arikanto, Suharsimi. 2004. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta, IKAPI
- Alwi, Syafaruddin, 2008. Manajemen Sumberdaya Manusia : Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta : BPF
- Bungin, Burhan. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Dunn, William. N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Iskandar A. 2012. Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan. Bogor : IPB Press
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, Totok dan Purwoko Soebianto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : PT. Retika Adi Utama
- Nugorocho, Riant. 2008. *Public policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Nugroho Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo
- Nugorocho, Riant. 2015. Kebijakan Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sholeh, Chabib. 2014. Dialetika pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat. Bandung : Fokus Media
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2013. Metode penelitian Administrasi. Jakarta : Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar T & Rosidah. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sumodiningrat. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa ; Menanggulangi Kemiskinan dengan Konsep Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Buku Kompas

Silalahi. 2012. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi*. Jakarta : Sinar Baru Algensindo

Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Winarno, budi. 2007. *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Lembaga

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2014. *Statistik Garis Kemiskinan Di Kabupaten Situbondo 210-2015*. Situbondo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Perundang-undangan

Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang pedoman umum penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Kabupaten Situbondo.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Kabupaten Situbondo.

Petunjuk Pelaksana Program Solusi Kemiskinan (*Proverty Solution Program/PSP*) di Kabupaten Situbondo.

Artikel Pada Jurnal

Kurniawan, AF Wijaya. 2014. *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian Di Kabupaten Tuban)*. Jurnal

Kebijakan Dan Administrasi Negara Publik (Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2017)

Wahyudi, Arif. 2008. *Evaluasi Evaluasi kinerja Program beras untuk Raskin di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan 2008 di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong)*. Jurnal kebijakan dan administrasi negara publik (diakses pada tanggal 22 Februari 2017)

Internet

<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/19271/terobosan-dadang-wigiarto-bupati-situbondo-1>. diakses 20 Februari 2017

<https://www.jatimprov.go.id/miskin-kultural-polemik-budaya-di-situbondo-1>. diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.30 WIB.

http://kabsitubondo.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=233. Diakses 20 Februari 2017

<http://www.jpip.or.id/artikelview-525.html>. Diakses 26 Februari 2017

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

LAMPIRAN

Foto-Foto





